



Akses ke Mata Pencaharian Hijau untuk Respons Lingkungan yang Inklusif di Kalimantan Tengah terhadap Perubahan Iklim (GLACIER)

Tujuan Pembangunan:

Meningkatkan akses ke mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan Eks Proyek Lahan Gambut (Eks PLG) di Kalimantan Tengah dengan mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2007 dan Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan Eks PLG.

Keluaran Utama:

1. Demonstrasi tentang investasi di bidang prasarana lingkungan yang mendukung respons terhadap perubahan iklim melalui pendekatan dan teknik partisipatif berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan akses ke mata pencaharian yang berkelanjutan.
2. Peningkatan kapasitas masyarakat dan otoritas lokal untuk memperbaiki akses ke fasilitas sosial ekonomi dan pasar di pedesaan dalam mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan melalui partisipasi penting dalam proses pengambilan keputusan dan strategi berbasis sumber daya lokal.
3. Model partisipatif untuk mengembangkan rantai nilai penghijauan dan mata pencaharian berkelanjutan diterapkan melalui upaya meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan lokal.

Mitra Utama:

- Sekretariat Bersama REDD+ di Kalimantan Tengah
- Komisi REDD+ di tingkat provinsi
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat provinsi dan kabupaten
- Dinas Pekerjaan Umum tingkat provinsi dan kabupaten
- Organisasi Masyarakat Adat
- Organisasi Pengusaha
- Organisasi Pekerja

Jangka Waktu:

1 tahun (September 2012 - Agustus 2013)

Cakupan Geografis:

Proyek ini berbasis di Kalimantan Tengah dan menangani lima desa, yaitu Aruk, Lawang Kajang, Bereng Bengkel, Tumbang Nusa dan Pilang. Proyek ini bekerja sama dengan beberapa kabupaten termasuk Kota Palangka Raya, Pulang Pisau dan Kapuas.

Donor:

UNDP dengan pendanaan dari Pemerintah Norwegia

Lembaga Mitra:

United Nations Office for Coordination on REDD+

Anggaran:

USD 1,398,517

Kontak

Emma Allen | Technical Officer | allen@ilo.org

Latar Belakang Proyek

Pada tahun 1995, Presiden Suharto memerintahkan pengeringan lahan gambut seluas lebih dari satu juta hektar di Kalimantan Tengah untuk dikonversi sebagai lahan sawah. Setelah lahan gambut ini dikeringkan dan dibangun beberapa kanal, kondisi tanah di sana ternyata tidak cocok untuk mendukung pertanian yang intensif. Akibatnya, kanal-kanal tersebut hanya digunakan untuk mengangkut kayu dan sebagian lahan gambut tersebut terbengkalai serta dialihkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit atau digunakan oleh masyarakat adat untuk bercocok tanam skala kecil. Lahan yang sudah terdegradasi ini sering mengalami kebakaran sehingga menimbulkan asap tebal yang meluas hingga melewati batas negara, tingginya emisi gas rumah kaca serta meningkatnya kerentanan mata pencaharian.

Kawasan Eks PLG ini menghadapi banyak tantangan akibat tingginya angka kemiskinan dan akses yang buruk ke mata pencaharian yang berkelanjutan, serta degradasi lingkungan yang buruk. Restorasi hutan dan lahan gambut di kawasan Eks PLG dibutuhkan agar dapat mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat dan untuk meningkatkan biodiversitas agar produktivitas hutan dan lahan gambut untuk jangka panjang dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan untuk menyediakan layanan ekosistem. Meskipun demikian ada banyak tantangan dalam melakukan pengembangan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah, termasuk penebangan liar, pengelolaan kebakaran, drainase lahan gambut, pembudidayaan yang berkelanjutan, ekspansi perkebunan, pelanggaran batas hutan lindung dan daerah konservasi serta penambangan ilegal.

Strategi Proyek

Mengakui pentingnya upaya untuk mencegah degradasi dan deforestasi lebih lanjut di kawasan Eks PLG, pada tahun 2007, Presiden Yudhoyono mengeluarkan instruksi (No. 2 Tahun 2007) yang mewajibkan adanya rehabilitasi dan konservasi kawasan Eks PLG. Pada tahun 2008, Rencana Induk Eks PLG yang komprehensif disusun untuk mencapai target ini. Rencana Induk untuk Rehabilitasi dan Revitalisasi Eks PLG di Kalimantan Tengah ini telah mengidentifikasi enam program utama untuk mendukung pengembangan yang berkelanjutan di kawasan ini, yaitu:

- (1) Pencegahan dan pengelolaan kebakaran;
- (2) Pengelolaan tata ruang dan infrastruktur;
- (3) Pengelolaan dan pelestarian lahan gambut secara berkelanjutan;
- (4) Revitalisasi pertanian;
- (5) Pemberdayaan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
- (6) Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas lembaga.

ILO menyediakan strategi dan metodologi untuk keenam bidang program yang utama ini agar dapat mengoptimalkan penciptaan lapangan kerja dan penghasilan bagi masyarakat setempat. Sesuai dengan Rencana Induk untuk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks PLG, proyek percontohan ini didasari pada pengetahuan dan praktik tradisional untuk mempromosikan kegiatan restorasi lingkungan, rantai nilai penghijauan dan pembangunan ekonomi lokal. Konvensi pokok ILO yang terfokus pada keadilan sosial menyediakan kerangka kerja untuk konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan. Secara khusus, Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat, serta kerangka kerja *Free and Informed Prior Consent* (FIPC), menyediakan pedoman untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat. Untuk memastikan kelangsungan pendekatan ini, proyek akan difokuskan pada pengambilan keputusan partisipatif berbasis masyarakat, yang melibatkan organisasi lokal serta organisasi pengusaha dan pekerja yang bekerja sama secara erat untuk mengoptimalkan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan bersama.

Tema utama proyek percontohan ini adalah akses yang berkelanjutan ke mata pencaharian yang lebih banyak dan lebih baik, dan ketiga komponen ini mendukung investasi di bidang lingkungan hidup dan meningkatkan konektivitas dan akses ke pasar. Proyek percontohan ini mengusulkan pelaksanaan proyek di lima desa di Kalimantan Tengah yang sebelumnya merupakan bagian dari kawasan Eks PLG. Kelima desa tersebut adalah Aruk, Lawang Kajang, Bereng Bengkel, Tumbang Nusa dan Pilang.

Ketiga komponen proyek tersebut adalah:

1. Demonstrasi tentang investasi di bidang prasarana lingkungan yang mendukung respons terhadap perubahan iklim melalui pendekatan dan teknik partisipatif berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan akses ke mata pencarian yang berkelanjutan.



memastikan aset-aset tersebut tidak saja dipelihara, tapi juga dapat ditingkatkan masa pakainya.

Pendekatan rantai nilai penghijauan akan digunakan untuk menilai satu atau dua sektor

2. Peningkatan kapasitas masyarakat dan otoritas lokal untuk memperbaiki akses ke fasilitas sosial ekonomi dan pasar di pedesaan dalam mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan melalui partisipasi penting dalam proses pengambilan keputusan dan strategi berbasis sumber daya lokal.
3. Model partisipatif untuk mengembangkan rantai nilai penghijauan dan mata pencaharian berkelanjutan diterapkan melalui upaya meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan lokal.

Proyek percontohan ini akan diinformasikan melalui rencana tata ruang kawasan Eks PLG dan kebutuhan masyarakat akan akses ke mata pencaharian yang berkelanjutan dengan menerapkan pendekatan perencanaan akses desa terpadu yang mempertimbangkan kondisi prasarana transportasi, sumber daya lingkungan dan aset masyarakat agar dapat menentukan bagaimana investasi dapat membantu memenuhi kebutuhan akan pembangunan lokal yang berkelanjutan secara sosial dan ekonomi.

Kapasitas pelaksanaan akan ditingkatkan melalui pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan mutu aset dan keterampilan pegawai pemerintah, kontraktor dan masyarakat dalam memelihara aset tersebut. Untuk memastikan inklusivitas, proyek percontohan ini akan menerapkan pendekatan partisipatif berbasis sumber daya lokal agar dapat memperkuat kepemilikan lokal atas inisiatif ini dan melibatkan organisasi pengusaha dan pekerja bila ada kesempatan. Untuk memastikan kelangsungan aset tersebut, proyek percontohan ini akan membantu pemeliharaan berbasis tenagakerja untuk

penghijauan yang dapat dikembangkan lebih lanjut, termasuk dengan mengidentifikasi kesenjangan keterampilan, dan hubungan pasar yang dapat menghambat pembangunan. Hasil temuan proyek Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (EAST) ILO, yang memperlihatkan bahwa pelatihan kewirausahaan yang melengkapi pelatihan keterampilan kerja akan menggandakan kemungkinan peserta mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha baru, dianggap sebagai praktik terbaik. Karenanya, inisiatif peningkatan kapasitas untuk rantai nilai penghijauan dan pembangunan ekonomi lokal akan melibatkan (a) pemilihan komoditas sasaran untuk mengembangkan rantai nilai, (b) analisis pemetaan rantai nilai, dan desain intervensi, (c) penilaian tentang kebutuhan keterampilan berdasarkan analisis potensi pasar, (d) pelatihan keterampilan berbasis kompetensi yang bersifat inklusif dan mencakup pengetahuan dan tehnik masyarakat adat, (e) penilaian dan sertifikasi untuk peserta pelatihan, dan (f) hubungan dengan sumber daya untuk modal awal, layanan penempatan dan pelatihan teknis.

Desain proyek percontohan ini mengakui pentingnya upaya untuk memberdayakan perempuan dan mengantisipasi inisiatif investasi di bidang prasarana yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja dan kegiatan rantai nilai akan meningkatkan peluang perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Prinsip akses yang adil ke peluang kerja akan menjadi prinsip utama dalam strategi proyek percontohan ini. Pasal-pasal dalam perjanjian kontrak dengan penyedia layanan dan masyarakat terkait prinsip kesetaraan akses ke peluang kerja dan pendekatan proaktif dalam mempromosikan partisipasi

perempuan dalam pekerjaan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pekerja perempuan dalam pelaksanaan proyek percontohan ini.

Dampak

Di akhir proyek, kelima desa sasaran diharapkan sudah dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk berinvestasi dalam prasarana lingkungan yang padat karya dan mendukung respons terhadap perubahan iklim serta meningkatkan akses ke pasar dan layanan sosial ekonomi agar dapat mendukung mata pencaharian hijau yang berkelanjutan. Dalam pendekatan “Pekerjaan Hijau melalui Karya Hijau” (*Green Jobs through Green Works*) ini, organisasi masyarakat madani, termasuk Organisasi Masyarakat Adat, diharapkan sudah memiliki keterampilan dan kapasitas yang lebih baik untuk memfasilitasi masyarakat dan terlibat dalam pembentukan forum konsultatif di desa-desa sasaran. Masyarakat diharapkan sudah dilatih tentang pendekatan berbasis sumber daya lokal untuk melaksanakan pekerjaan dan akses lingkungan serta memelihara aset yang telah dibangun atau direhabilitasi, dan minimal 10.000 hari kerja tambahan akan diciptakan (untuk 30 persen perempuan, 30 persen kaum muda dan 2 persen penyandang disabilitas).

Dalam hal dukungan untuk akses ke mata pencaharian hijau, minimal 250 orang (40 persen perempuan, 30 persen kaum muda dan 2 persen penyandang disabilitas) dari desa-desa sasaran dan para pembuat kebijakan pilihan serta mitra sosial diharapkan sudah memiliki keterampilan dan kapasitas yang lebih baik untuk menangani mata pencaharian yang berkelanjutan dengan menerapkan pendekatan rantai nilai. Mereka diharapkan memperoleh manfaat dari pelatihan keterampilan terkait sesuai kebutuhan perekonomian hijau dan penilaian atas prasarana sosial, ekonomi dan lingkungan di dalam dan di sekitar masyarakat mereka dan lebih mampu menghadapi dampak perubahan iklim terhadap lingkungan mereka. Sedikitnya 50 persen peserta pelatihan yang berhasil diharapkan dapat bekerja atau membuka usaha baru tiga bulan setelah mengikuti pelatihan tentang mata pencaharian hijau ini.

Kegiatan-kegiatan ini memberi pelajaran bagi inisiatif REDD+ tentang cara menciptakan mata pencaharian alternatif sambil mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Model pengembangan mata pencaharian hijau akan didokumentasikan dan strategi pendekatan partisipatif berbasis sumber daya lokal untuk



investasi di bidang prasarana lingkungan yang mendukung respon optimisasi pekerjaan terhadap perubahan iklim serta panduan tentang pengambilan keputusan partisipatif berbasis masyarakat dalam konteks REDD+ akan disusun.

ILO Kantor Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22
 Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
 Jakarta 10250
 Telp. +62 21 391 3112
 Faks. +62 21 310 0766
 E-mail: jakarta@ilo.org
 Website: www.ilo.org/jakarta